

**POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR
KEHUTANAN MELALUI PERAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI (GANIS PHPL)**

***POTENTIAL NON-TAX STATE REVENUE (PNBP) IN THE FORESTRY
SECTOR THROUGH THE ROLE OF SUSTAINABLE PRODUCTION
FOREST MANAGEMENT TECHNICAL WORKERS (GANIS PHPL)***

Popi Tri Astuti¹, Hari Kaskoyo²

^{1,2}Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

ABSTRACT. Indonesia is a country with abundant natural resource potential. One of the sectors with the largest natural resource output is the forestry sector. Main sources such as wood are still the target of forest management in Indonesia, in addition to several non-timber forest products (NTFPs) which continue to be developed as commodities with potential high economic value. The decline in natural forest log production results threatens to reduce the Non-Tax State Revenue (PNBP) sector. forestry. To anticipate a decrease in PNBP, the Government then tried to increase the rates for Forest Resources Provisions (PSDH) and Reforestation Funds (DR). It is hoped that this condition will enable us to study in detail the production of logs and compensation for PSDH, DR funds and Forest Utilization Business Permits (IUPH) on a regular basis for each Forest Concession Rights (HPH)/Timber Forest Product Utilization Business Permit (IUPHHK) holder. For this reason, Sustainable Production Forest Management Technical Staff (GANIS-PHPL) plays a role in anticipating the decline in PNBP in the forestry sector through the skills and competencies they possess. This can also be supported by the increasing development of technology, so that it is able to utilize basic technology systems and information systems.

Keywords: GANIS-PHPL., PNBP., Forestry.

ABSTRAK. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sektor dengan hasil sumberdaya alam terbanyak yaitu.sektor kehutanan. Sumber utama seperti kayu masih menjadi target pengelolaan hutan di Indonesia disamping beberapa produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kian terus dikembangkan sebagai komodita dengan potensi nilai ekonomi yang tinggi. Semakin merosotnya hasil produksi kayu bulat hutan alam mengancam penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP, Pemerintah kemudian berusaha menaikkan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Kondisi ini mampu diharapkan mampu untuk mengkaji secara rinci terkait produksi kayu bulat dan kompensasi dana PSDH, DR dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) secara berkala kepada setiap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Untuk itu, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS- PHPL) memegang peranan yang dimiliki untuk mengantisipasi kemerosotan PNBP disektor kehutanan melalui keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini juga dapat didukung dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga mampu memanfaatkan basis sistem teknologi dan sistem informasi.

Kata Kunci : GANIS-PHPL., PNBP., Kehutanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sektor dengan hasil sumberdaya alam terbanyak yaitu.sektor kehutanan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan lebih, namun kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabkerusakan hutan yaitu karena adanya gangguan fungsi atmosfer untuk melindungi bumi dari pendinginan dan pemanasan yang berlebihan (Aprianto *et al.*, 2015). Meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan

ketidakseimbangan perubahan iklim, sehingga untuk mengatasinya diperlukan tindakan yang bisa dilakukan dilakukan secara bersamaan yaitu mitigasi dan adaptasi (Bakri *et al.*, 2023).

Sebagai salah satu kekayaan alam yang menjadi modal dasar pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi. Sejalan dengan pasal 33 undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Silooy *et al.*, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan direncanakan Rp 150 triliun dari total PNBP sektor kehutanan tersebut. Selanjutnya Rp 2,4 triliun berasal dari Dana Reboisasi (DR), Rp 1,8 triliun dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Rp 1.463 miliar dari pendapatan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) serta Rp 16.403 miliar dari pendapatan penggunaan kawasan hutan.

Suatu hasil yang begitu besar dan berkontribusi terhadap sektor pendapatan tunai negara saat itu, di mana sektor kehutanan menempati urutan kedua setelah minyak dan gas dengan menghasilkan sekitar US 3,5 miliar per tahunnya (Barr *et al.*, 2006) sekaligus menjadi tulang punggung negara pada saat itu (Singer, 2008). Sumber utama seperti kayu masih menjadi target pengelolaan hutan di Indonesia di samping beberapa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kian terus dikembangkan sebagai komodita potensi dengan nilai ekonomi yang tinggi (Prasetyo *et al.*, 2017). Telah terlihat bahwa sektor kehutanan juga menjadi penyumbang devisa nasional diamping sektor pertambangan dan ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga secara nasional.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.54/Menhut-II/2014 Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANIS-PHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal (Syahputra *et al.*, 2017).

Selain Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK, GANIS-PHPL juga berperan dalam mengukur potensi jasa lingkungan pada suatu ekosistem dan juga pengukuran volume kayu bulat. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) yang berasal dari Hutan Alam telah diubah melalui kebijakan penatasahaan hasil hutan yang dikenal dengan "kebijakan *self assessment*". PUHH ini merupakan aktivitas pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pengukuran dan pengujian, pemanenan atau penebangan, penandaan, peredaran atau pengangkutan, serta pengolahan hasil hutan kayu. Mekanisme pelaksanaannya yaitu secara *self assessment* melalui SI-PUHH. Pada pelaksanaan ini peran WAS- GANIS-PHPL pada Dinas Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya digantikan dengan otomatisasi melalui system secara online. Ruang lingkup PUHH kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang izin sah atau pengelola hutan dan dilaksanakan secara *self assessment* melalui SI-PUHH Online (Dinamika Kehutanan, 2015).

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat pada Bulan Oktober – Desember 2023. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, software *Microsoft Word*, dan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan sebagai bahan kajian. Metode yang digunakan yaitu studi literatur atau *literature review* pada paper-paper yang terkait di mana tulisan ini mencakup perumusan dan informasi yang diringkas sehingga membentuk topik baru dari hasil penelitian - peneliti terkait sebelumnya.

Adapun langkah-langkah *literature review* pada tahapan metode yang dilakukan dalam pembuatan artikel ini yaitu:

1. Menentukan topik yang dipilih dalam pembuatan artikel (formulasi permasalahan);
2. Mencari *study literature* terkait topik yang telah ditentukan (pencarian literature);
3. Teknis pencarian *study literature* terkait yaitu jurnal-jurnal yang terindeks scopus/ jurnal shinta dan/atau jurnal dari web *Google Scholar*;
4. Melakukan evaluasi data dari paper atau jurnal yang telah dikumpulkan;
5. Setelah mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dalam pembuatan artikel ini, lalu dihimpun menjadi satu topik artikel; dan
6. Analisis dan interpretasi.

Formulasi permasalahan dilakukan dengan memilih topik. Pada penelitian ini topik yang dipilih adalah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL). Langkah selanjutnya adalah pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini dapat memberikan gambaran mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL). Proses pencarian dan pengumpulan artikel atau jurnal penelitian dilakukan menggunakan *Google Scholar*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah diantaranya bahan galian pertambangan. Pertambangan di Indonesia merupakan sector yang menghasilkan devisa Negara paling besar. Meningkatnya permintaan terhadap lahan yang menjadi salah satu factor penyebab yang mendorong perubahan penggunaan lahan (Malawati et al., 2020). Selain dari sektor pertambangan, menurut Aprianto et al., (2015) mengatakan bahwa sektpr kehutanan juga menjadi salah satu sector palong penting dalam pembangunan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sumber daya hutan tropis dan ekosistemnya merupakan sumber daya dalam industri kehutanan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, bukan hanya sebagai penyedia bahan baku utama bagi industri hilir khususnya kayu bulat, namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja (Frianto, 2023).

1. Pengukuran Volume Kayu Bulat oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL)

Diawali dengan keprihatinan akan besarnya laju kerusakan hutan tropis dunia, beberapa kelompok penggiat lingkungan dan konsumen kayu tropis di negara-negara maju (Amerika dan Eropa) menuntut agar diberlakukan program sertifikasi (sebagai instrumen pasar) terhadap produk hutan untuk dapat menahan laju kerusakan hutan tersebut. Sebagaimana tuntutan pasar (*market driven*), Sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) harus memenuhi prinsip independensi, non-diskriminatif, obyektif dan transparan, yang implementasinya bersifat sukarela (*voluntary*) (dephut.go.id, 2009).

Penyediaan produksi kayu bulat pada tahun 2022 mencapai 56.57 juta m³, dengan peningkatan sebesar 1.83% jika dibanding dengan produksi tahun sebelumnya. Produksi kayu olahan yang berasal dari kayu bulat Indonesia paling dominan digunakan untuk serpih kayu, kayu lapis dan kayu gergajian (PHL, 2023). Industri perkerayuan sendiri memiliki tantangan yang semakin berat dari waktu ke waktu. Peluang industri kehutanan juga sangat bergantung pada lahan kelola (*logging/managed forests*) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Berbagai potensi yang dimiliki oleh sektor industri kehutanan perlu dikembangkan dengan penerapan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran, mengakomodasi perubahan, dan berkelanjutan.

Mutaqin, et al (2022) berpendapat bahwa beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kehutanan salah satunya adalah melalui sertifikasi tenaga

kehutanan, yang diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas produk kayu yang dihasilkan oleh industri dalam bidang perikanan. Tenaga teknis kehutanan yang bersertifikasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan industri perikanan yang berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi dan pemanfaatan hutan lindung wajib memiliki dan/atau memperkerjakan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH). GANISPH merupakan sebuah profesi di bidang kehutanan. Berdasarkan Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2014: Peraturan No.1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat (Frianto, 2023).

Dalam kegiatan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk proses registrasi GANIS-PHPL masih dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi proses GANIS-PHPL terdiri dari penerimaan berkas calon GANIS-PHPL pembuatan izin GANIS-PHPL, perpanjangan izin GANIS-PHPL dan pembuatan laporan petugas GANIS-PHPL, sehingga untuk kebutuhan dan pengolahan data tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena pencarian data masih berupa berkas dokumen yang tersimpan dalam lemari arsip (Syahputra et al., 2017). Dengan berkembangnya teknologi sistem arsip dan database sudah terekam dan dapat diimplementasi melalui 53ducat yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. SIPUHH adalah mekanisme perijinan berupa hasil perhitungan yang telah dilakukan berbasis teknologi informatika (TI) yang dapat diakses secara online. Peran penting aplikasi SIPUHH dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mencatat mempersiapkan mengumpulkan mengolah menganalisis, menyimpan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu dan akan digunakan sebagai bukti pembayaran PSDH/DR pada aplikasi SIPNBP. Maka peran penting SIPUHH terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi tolak ukur perhitungan pembayaran (Alfons et al.2022).

Total DR dan PSDH mencapai Rp 4,2 triliun atau 84% dari total PNBP untuk sektor kehutanan. Pungutan DR diperoleh dari setiap produksi kayu bulat dari hutan alam, sedangkan pungutan PSDH selain dari hutan alam juga dari hutan tanaman. Oleh karenanya PNBP untuk sector kehutanan secara signifikan bergantungnya dan tingkat produksi kayu bulat. Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam menekan perolehan PNBP yang berpengaruh di sector kehutanan (Satria et al. 2015).

Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui peraturan PUHH. Kegiatan PUHH melibatkan tenaga teknis yang disebut GANIS-PHPL-PKB-R dan WAS-GANIS PHPL PKB-R. GANIS-PHPL PKB-R adalah tenaga teknis pada 111 unit IUPHHK-HA yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat serta melakukan PUHH yang berasal, dari hutan alam. WAS GANIS-PHPL PKB-R adalah tenaga teknis pada instansi kehutanan yang memiliki kompetensi sama dengan GANIS-PHPL PKB-R dan bertugas mengawasi, memeriksa dan melaporkan hasil kerja GANIS-PHPL PKB-R. Keberadaan mereka diharapkan mampu mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH-DR dan mendukung upaya terciptanya pengelolaan hutan produksi lestari (Hajrah et al., 2015).

Pembayaran PNBP IPPKH untuk kepentingan pembangunan yang diluar kegiatan kehutanan dan dikenakan kepada wajib bayar yang telah memiliki IPPKH dari Menteri. Wajib bayar adalah pemegang perjanjian IPPKH dari Menteri, untuk perizinan yang berada pada provinsi dengan luasan hutan nya melebihi dari 30% dari luas daratan provinsi. PNBP IPPKH dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan yang diluar kegiatan kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/2008). Pembayaran PNBP dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi pengganti lahan yang menggunakan untuk kegiatan pertambangan oleh pemegang IPPKH, dan untuk pembayaran PNPB sesuai dengan tanggal keluarnya IPPKH yang dibayarkan setiap tahun.

2. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sebagai Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan (P.35 / Menhut-II/2007). Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), hasil hutan bukan kayu adalah hasil-hasil biologi selain kayu yang diperoleh dari hutan. Definisi lainnya menyebutkan segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Di Indonesia sampai saat ini budidaya tanaman HHBK belum banyak dilaksanakan, sebagian besar produk HHBK masih diambil dari dalam hutan sehingga produksi HHBK yang berkesinambungan tidak lagi terjamin. Akibatnya sumberdaya HHBK menjadi hancur bahkan beberapa jenis masuk kategori langka, seperti gaharu, damar rasak, jelutung, kapur barus, jermang, ketiau, balau dan lain-lain sudah masuk ke dalam daftar Appendix II CITES (Sumadiwangsa dan Mas'ud, 1999).

Produk HHBK telah menjadi pemasukan sekaligus pendapatan langsung bagi pemenuhan kebutuhan banyak rumah tangga dan masyarakat di seluruh dunia. Di banyak negara, total nilai ekonomi dari HHBK diperkirakan mampu memberi sumbangan terhadap pemasukan negara yang sama besar, bahkan mungkin lebih, daripada yang dapat diperoleh dari kayu bulat. Di Indonesia sendiri, nilai ekonomi HHBK diperkirakan mencapai 90 % dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (Lampiran Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Kriteria Penetapan HHBK Unggulan). Selama ini HHBK nampaknya masih dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai hasil hutan ikutan. Hal ini tidak lepas dari besarnya variasi jenis HHBK, sehingga tidak ada penanganan yang fokus dan terarah sebagaimana pada produk kayu bulat. Akibatnya, kebanyakan HHBK tidak terkelola secara memadai agar memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah yang tinggi. Rendahnya kinerja pengelolaan HHBK merupakan akibat dari rendahnya perhatian pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mengembangkan HHBK (Wiratno 2014).

HHBK memiliki nilai yang sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Kontribusi HHBK (rotan, damar, arang, getah-getahan, gaharu, dll) pada tahun 1999 tercatat sebesar US \$ 8,4 juta, kemudian meningkat menjadi US \$ 19,74 juta pada tahun 2002. Jumlah tersebut belum termasuk kontribusi dari hasil perdagangan flora dan fauna yang tidak dilindungi (PP No. 8/1999) sebesar US \$ 61,3 ribu (1999) kemudian meningkat menjadi US \$ 3,34 juta pada tahun 2003. Hasil ini terus meningkat sejalan dengan permintaan pasar yang terus meningkat secara signifikan (Moko 2008). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional sebesar 0.90 persen (Rp16.69 miliar), dan sebesar 0.67 persen (Rp17.42 miliar) pada tahun 2012 (BPS 2012).

Berdasarkan data Dirjen PHPL Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2015), produksi HHBK Secara nasional sebesar 251 025.62 ton yang berasal dari kelompok minyak, resin getah, kulit, dan kelompok lainnya. Provinsi Riau menjadi provinsi dengan produksi HHBK terbanyak sebesar 23 357.05. Produksi HHBK Provinsi NTB pada periode tahun 2008 - 2010 yang berasal dari dalam kawasan hutan mencapai nilai sebesar 127.000 ton untuk komoditi Kemiri, 273 liter untuk komoditi Lebah Madu, 70.800 ton untuk komoditi Rotan, dan 313.150 batang untuk komoditi Bambu (Dinas Kehutanan NTB 2011).

HHBK tidak terbatas hanya madu, rotan, damar dan gaharu saja, akan tetapi juga termasuk hasil-hasil produksi turunannya termasuk juga jasa lingkungan (Sumadiwangsa 1998). Sejalan dengan perkembangan IPTEK maka beberapa jenis pohon HHBK manfaatnya tidak sebatas hanya satu fungsi saja namun multifungsi, seperti fungsi sebagai bioenergi (bioethanol, biofuel, biogas) meliputi: mimba (*Azadirachta indica*), saga hutan (*Adenanthera pavonina*), mangapari (*Pongamia pinnata*), nyamplung/bintangur (*Calophyllum* sp.), kesambi (*Scheelea oleosa*), gatep pait (*Samadera indica*), jarak pagar (*Jatropha curcas*), kelor (*Moringa oleifera*), kacang hiris (*Cajanus cajan*), sukun (*Artocarpus altilis*), aren (*Arenga pinnata*), sagu (*Metroxylon* sp.) dan

aneka alga mikro (Moko 2008). Pemanfaatan dan pengelolaan HHBK mempunyai prospek yang sangat baik dan strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan, pemerataan daerah dan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar.

3. Potensi Nilai Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krisnanto (2021) yang mengatakan bahwa pada besar nilai PNBP sektor wisata yang dihasilkan oleh Taman Nasional, Balai Besar dapat berkontribusi terhadap pembangunan untuk masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam kawasan TN-BTS dengan melakukan bagi hasil pendapatan pemanfaatan wisata TN-BTS. Dengan melakukan bagi hasil pendapatan sektor wisata TN-BTS, maka desa yang dihuni oleh masyarakat adat Tengger mendapatkan pemasukan desa yang cukup signifikan untuk dipergunakan melakukan pembangunan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagi hasil pendapatan sektor wisata kepada masyarakat adat Tengger memiliki relevansinya dengan memperhatikan beberapa alasan:

1. Masyarakat adat Tengger adalah pemilik asal dari kawasan TN-BTS. Mereka adalah komunitas yang kehidupan sosial budayanya ikut berperan aktif menjaga kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem TN-BTS yang telah memberikan kontribusi pendapat bagi Negara sangat besar.
2. Masyarakat adat Tengger yang bermukim di Desa Ngadas dan Desa Ranupani berada di Zona Pemanfaatan Tradisional TN-BTS yang menjadi kewenangan Balai Besar dalam pengelolaannya. Telah diamanatkan dalam pasal 3 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem tidak saja bertujuan mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta ekosistemnya namun juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karena itu, Balai Besar TN-BTS juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan di kedua desa tersebut.

Kebijakan bagi hasil pendapatan pemanfaatan kegiatan wisata TN-BTS dengan masyarakat adat Tengger yang tinggal dalam Zona Pemanfaatan Tradisional ini juga perlu disertai dengan perubahan status Balai Besar TN-BTS. Saat ini status Balai Besar TN-BTS sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) KemenLHK. Telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh UPT Kementerian, harus dipertanggungjawabkan kepada Negara dengan menyetorkan ke Kas Negara. Balai Besar TN-BTS tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Sebagai gambaran, walaupun dalam data statistik menunjukkan PNBP dari TN-BTS cukup besar, namun porsi yang diperoleh Balai Besar sebagai pengelola TN-BTS hanya sebesar 5%. Sedangkan 95% pendapatan lainnya dibagi dengan Pemerintah Kabupaten dimana TN-BTS secara administrative berada, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Halim, 2018).

Sistem penganggaran program kegiatan Balai Besar memiliki kebergantungan sangat tinggi kepada struktur anggaran APBN. Kondisi ini menjadikan Balai Besar terbatas inovasinya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki TN-BTS. Tidak saja pemanfaatan untuk pelestarian ekologi yang ada di TN-BTS, namun juga pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa yang berada dalam Zona Pemanfaatan Tradisional. Agar Balai Besar TN-BTS dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam kawasan TN-BTS maka perlu mengubah status Balai Besar yang semula berstatus UPT menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peranan tenaga teknis diharapkan dapat menjadi fasilitator, ,motivator, dinamisator dalam mendorong para pemegang ijin pengelolaan dan pemanfaatan hutan negara dalam kesadaran pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH-DR agar dapat meningkatkan PNBP negara.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait potensi PNPB GANUIS-PHPL di sector kehutanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Pak Hari dan Pak Yano selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam pembuatan tulisan ini. Serta teman-teman seangkatan di Jurusan Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons,Y, Aponno,H,S,E,S, dan Mardiatmoko,G.2022. Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (Sipuhh) Online Terhadap Pnbp Yang Berasal Dari Provinsi Maluku. *Jurnal Agroterpadu*.1(2) 194-199.
- Andayani,W. 2014. Strategi Penetapan Harga dan Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Sektor Kehutanan. Yogyakarta (ID) : *Prosiding Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan Kayu*.
- Aprianto,D, Wulandari,C, dan Masruri,N,W.,2015.Karbon Tersimpan Pada Kawasan Sistem Agroforestry Di Register 39 Datar Setuju KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. (1) 21-30.
- Aronggear,A,B, Wahyudi, dan Ungirwalu,A.2,021.Tren Produksi Kayu Bulat IUPHHK Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PNPB Sektor Kehutman Di Prov.insi Papua. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*. 7(2) 171-185.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Data Luas Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia*. Jakarta (ID) : Badan Pusat Statistik.
- Bakri,S, Aprianto,D, Yuwono,S,B, Riniarti,M, Abidin,Z, Kaskoyo,H, dan Artika,E. 2023. A Simple Model To Estimate Carbon Stock Based On River Discharge: Supporting The Next Implementation Of Redd+ In Indonesia Under Paris Agreement Regime. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*. 14 (02) 1404-1416.
- Barr,C, Resosudarmo,I,A,P, Dermawan,A, McCarthy,J, Moeliono,M, dan Setiono,B. 2006. *Decentralization of forest administration in Indonesia. In Implication for Forest, Sustainability, Economic Development and Community Livelihoods (Issue May 2021)*. Center for International Forestry Research.
- Departemen Kehutanan (Dephut).2009. Program Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_V02/I_V02.htm, Februari 2011.
- Dinamika Kehutanan.2015. Apa Saja Sih Perubahan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan secara Self Assessment. <http://https://aguraforestry.wordpress.com/tag/penatausahaan-hasil-hutan/>. Diakses 1 Agustus 2019.
- Frianto,D.2023. Penerapan Standardisasi Dalam Mendukung Kompetensi GANISPH. *STANDAR: Better Standard Better Living*. 2(1) 23-25.
- Hajrah,H, Kartodihardjo,H, dan Nugroho,B. 2015. Efektivitas tenaga teknis penguji kayu bulat dalam penatausahaan hasil hutan (studi kasus hutan alam kalimantan tengah). *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumah Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*. 2(3) 191-201.
- Halim,W. 2018. Dinamika Implementasi Kebijakan Konservasi Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Borneo Administrator*. 14(1) 53–68.
- Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Jakarta (ID) :Kementrian Kehutanan Republik Indonesia.
- Krisnanto,W. 2021. Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1) 358-364.
- Malawati,Y,N, dan Itta,D.2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Penerimaan-N

- Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Pada PT. Kalimantan Energi Lestari di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*. 3(6) 1134-114-0.
- Moko,H. 2008. *Menggalakan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Produk Unggulan*. Jakarta (ID) : Informasi teknis 6(2). Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.
- Mutaqin,D,J, Ferawati,O,N, dan Nur,H,R. 2023. Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pasca Pandemi Covid 19. *Working Paper Bapenas*. 5(1) 48-62.
- Pengelolaan Hutan Lestari. 2022. Satu Data Ditjen PHL. <https://phl.menlhk.go.id/infografis> (diakses tanggal 18 Januari 2023).
- Prasetyo,W,A, Budiani,E,S, Arlita,T.2017.Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom Faperta*.,•4(1).
- Satria,A, Soenarno,S, dan Endom,W.2015. Potensi penerimaan negara bukan pajak dari limbah kayu pemanenan di hutan alam.dan hutan tanaman. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 12(3) 29153.
- Silooy,I,W, Mardiatmoko,G, dan Maail, R,S, 2019. Analisis Tingkat Keragaman Pengukuran Volume Kayu Bulat Oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) Pada Aplikasi SI-PUHH Online. *Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Program Studi Manajemen Hutan Pascasarjana Universitas Pattimura)*. 3(2) 148-159.
- Sumadiwangsa,S. 1998. Karakteristik Hasil Hutan Bukan Kayu. *Duta Rimba*. 212 (23): 44-48.
- Syahputra,H, Syazili,A, Mirza,H. 2017. Perangkat Lunak Registrasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) Berbasis Web. *Jurnal Informatika*. 3(1) 34- 39.
- Wiratno. 2014. Strategi Dan Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Rangka Kelola Kawasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta (ID) : *Prosiding Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan Kayu*.